

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya. Oleh karena itu setiap warga negara Indonesia mempunyai persamaan di mata hukum dan tidak membedakan didalam menegakkan hukum. Agar kehidupan bangsa Indonesia dapat berjalan dengan harmonis serta berkembang dan berkehidupan yang adil dan berdaulat.

Segala tingkah laku yang diperbuat oleh manusia pastilah harus berasaskan hukum dan ketentuan yang berlaku saat ini. Pemerintah dalam memperlakukan seluruh warganya akan selalu berbuat adil. Adil dalam arti memperoleh hak yang seimbang dengan melaksanakan seluruh kewajibannya.

Setiap manusia menyandang kewajiban yang sudah di atur dan harus dipatuhinya. Sebaliknya juga manusia pasti mempunyai hak-hak yang dimiliki sejak ia dilahirkan. Dari berbagai macam hak yang melekat pada diri manusia itu telah di atur dan ditentukan pula peraturan yang bersangkutan dengan hak-hak tersebut. Dengan demikian manusia selain dihadapkan dengan kewajiban yang harus di penuhiya mereka juga harus

memperjuangkan hak-hak mereka dewasa ini. Pemerintah memberikan peluang untuk setiap warga negaranya agar mereka dapat merasakan serta menikmati hak-hak dan kepentingannya tentu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang telah mengikatnya.

Manusia dalam kehidupannya adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia seringkali tidak dapat menghindari dari yang namanya konflik atau sengketa antar manusia lainnya. Sengketa dapat terjadi apabila seseorang menguasai, mengurangi, atau melanggar hak orang lain yang berkaitan dengan mempertahankan hak yang bersangkutan.

Dalam hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, pemeriksaan, memutusnya dan pelaksanaan dalam putusan tersebut.¹ Tuntutan hak merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya “*eigenrichting*” (bertindak sendiri untuk mendapatkan haknya).

Tuntutan hak ada dua macam yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa (*jurisdictie contentieuse*) yang dikenal dengan gugatan dan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut dengan permohonan (*jurisdictie volontaire*). Dimana pihak yang bersengketa atau pihak yang merasa haknya dilanggar, dan tidak dapat menyelesaikan

¹ Sudikno Mertokusumo, 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hal. 2

sengketa maupun mendapatkan kembali haknya dengan cara kekeluargaan (perdamaian), maka pihak yang bersangkutan akan menyertakan perkaranya ke Pengadilan Negeri untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pihak yang bersengketa tersebut akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Gugatan merupakan tuntutan hak yang mengandung sengketa, dimana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat.² Hukum acara perdata juga mengatur tentang bagaimana caranya mempertahankan hak-hak yang dimiliki oleh seseorang tersebut tentunya dengan perantaraan pengadilan dan hakim. Dalam memperjuangkan hak-haknya, ada dua macam upaya hukum.

Dalam hukum acara perdata yang dapat dilakukan yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Istilah upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim.³

Tidaklah mungkin rasanya suatu putusan hakim itu adalah mutlak benar dan tidak mustahil pula akan menimbulkan suatu permasalahan dalam pelaksanaan di kemudian hari. Hal itu sangat mungkin akan terjadi, bilamana pihak ketiga merasa hak-hak serta kepentingannya dirugikan atau dilanggar dengan adanya putusan tersebut, maka pihak ketiga dapat

² Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, 2007. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, hal. 13.

³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, hal. 142.

mengajukan gugatan perlawanan terhadap putusan tersebut ke Pengadilan Negeri.

Pihak ketiga disini bukanlah salah satu pihak yang berperkara dalam pokok utama atau sebelumnya. Pihak ketiga disini merupakan pihak luar dari perkara pokok utamanya. Suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan di dalam bunyi isi putusan tersebut memerintahkan panitera atau juru sita untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap benda milik pihak yang dikalahkan merupakan alasan bagi pihak ketiga untuk mengajukan gugatan perlawanan apabila benda yang dijadikan obyek sita eksekutorial tadi oleh orang lain (pihak ketiga) sebagai barang miliknya dan bukan milik pihak yang dikalahkan dalam perkara semula.

Pihak ketiga tersebut mempunyai hak untuk melakukan perlawanan apabila dinilai pelaksanaan isi putusan hakim yang memerintahkan sita eksekusi terhadap obyek milik pihak ketiga tersebut telah merugikan ataupun telah melanggar hak dan kepentingannya. Sita eksekutorial merupakan penyitaan yang semata-mata untuk melaksanakan putusan atau eksekusi pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau (*inkracht*).

Adanya perlawanan dari pihak ketiga (*derden verzet*) ini dimaksudkan untuk mempertahankan obyek sita eksekusi yang menjadi hak miliknya yang berupa tanah beserta isinya tersebut, agar tidak

berpindah tangan ke pihak lain atau ke tangan penggugat. Yang putusan sebelumnya dimenangkan oleh penggugat dan dikabulkannya sita eksekusi atas obyek milik pelawan oleh hakim.

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.⁴ Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita jaminan ataupun sita eksekusi pada dasarnya tidak hanya dapat diajukan atas hak milik saja tetapi juga didasarkan pada hak-hak lain seperti Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Tanggungan, Hak sewa, dan lain-lainnya.

Menurut pasal 207 HIR yang menyatakan bahwa “ terhadap sita eksekutorial baik yang mengenai barang tetap maupun barang bergerak pihak yang dikalahkan dapat mengajukan perlawanan ”. Hal ini berarti bahwa seseorang yang mengaku sebagai pemilik barang yang di sita eksekutorial dapat mengajukan perlawanan terhadap sita eksekutorial atas barang tersebut.

Perlawanan ini dapat di ajukan baik secara tertulis maupun lisan kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan dan tidak akan menghambat di mulainya pelaksanaan putusan, kecuali kalau pengadilan memberi perintah untuk menangguhkan pelaksanaan.

Jika sita eksekusi itu diawali dengan penetapan sita eksekusi oleh ketua Pengadilan Negeri setelah putusan dijatuhkan terhadap sejumlah

⁴ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

harta kekayaan milik pihak yang dikalahkan maka disebut sita eksekusi atau sita eksekutorial (*Executorial atau Beslag*). Dalam perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga, jika pada dasarnya apabila yang menjadi objek sita eksekutorial adalah barang milik pihak yang kalah atau Tergugat sudah seharusnya harus memenuhi prestasinya atau kewajibannya atas perbuatannya dengan catatan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah benar kenyataannya.

Dalam hal ini pihak ketiga tadi disebut Pelawan, sedangkan penggugat dalam perkara semula dalam perlawanan, disebut terlawan penyita dalam perkara semula, dalam perlawanan disebut pihak terlawan tersita. Yang dimohonkan oleh pelawan dalam perlawanannya adalah : ⁵

1. Agar dinyatakan bahwa perlawanan tersebut adalah tepat dan beralasan
2. Agar dinyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang benar.
3. Agar sita jaminan atau sita eksekutorial yang bersangkutan diperintahkan untuk diangkat.
4. Agar para terlawan dihukum untuk membayar biaya perkara.

Dengan demikian bahwa suatu perkara perdata yang diawali dengan gugatan pasti akan menimbulkan suatu konflik atau sengketa yang

⁵ Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, Hal. 169

harus segera diselesaikan dan diputus berdasarkan dalil yang benar tentunya. Perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga adalah salah satu upaya hukum luar biasa, yang harus dibuktikan oleh pelawan yang mana pelawan harus mengetahui alasannya terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatannya ke meja hijau.

Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memberikan putusan haruslah berdasarkan dalil-dalil hukum yang benar dan bukti-bukti yang benar adanya. Tetapi, apabila pelawan tidak puas terhadap putusan hakim pelawan dapat mengajukan upaya hukum biasa seperti Banding dan Kasasi. Agar pelawan bisa mendapatkan lagi apa yang menjadi hak-haknya. Untuk itu pelawan harus benar-benar membuktikan gugatan perlawanannya agar perlawanan pelawan itu di anggap benar oleh hakim pengadilan negeri.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*). Maka penulis ingin mengangkat serta meneliti dan menyusun dalam penulisan skripsi dengan judul: “ **PERLAWANAN PIHAK KETIGA (*DERDEN VERZET*) TERHADAP SITA EKSEKUTORIAL DALAM PERKARA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)** “

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah digunakan untuk memperjelas masalah-masalah yang akan diteliti, yang mana rumusan masalah ini memberikan arahan yang penting dalam membahas masalah yang diteliti. Sehingga akan mudah dalam melakukan penelitian dan sesuai dengan target yang diinginkan. Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi alasan pelawan mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita eksekutorial dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan putusan perlawanan terhadap sita eksekutorial yang diajukan oleh pihak ketiga?
3. Bagaimana pelaksanaan sita eksekutorial terhadap obyek milik pihak ketiga yang diputuskan oleh hakim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan yang menjadikan pelawan mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita eksekutorial dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan putusan perlawanan terhadap sita eksekutorial yang diajukan oleh pihak ketiga.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan sita eksekutorial terhadap objek milik pihak ketiga yang diputuskan oleh hakim.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas, diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi penulis

Dengan ditulisnya skripsi ini, dapat menambah wacana serta cakrawala ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri Surakarta tentang perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) terhadap sita eksekutorial dalam perkara perdata.

2. Bagi masyarakat

Dari hasil penelitian skripsi ini, diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan jawaban untuk membantu memecahkan masalah yang mungkin sedang dihadapi oleh pembaca atau masyarakat khususnya yang menyangkut tentang perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita eksekutorial dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta.

3. Bagi ilmu pengetahuan

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu hukum umumnya dan khususnya tentang perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita eksekutorial dalam perkara perdata.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan itu. Sedangkan metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁶

Adapun mengenai metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan normatif sosiologis, yang artinya adalah suatu pendekatan dengan cara pandang dari aspek hukum mengenai

⁶ Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiyanto, 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal. 1

segala sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat yang mempunyai akibat hukum untuk dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.⁷ Sehingga dapat diketahui bagaimana perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita eksekutorial dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Jenis penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian diskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran data yang selengkap-lengkapny mengenai perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita eksekutorial dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder, untuk memperoleh dasar teori dalam memecahkan masalah yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan:

⁷ Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI, hal. 250

1) Bahan Hukum Primer

- a) KUH Perdata
- b) Yurisprudensi
- c) HIR
- d) Rbg

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku bacaan, artikel ilmiah, dan hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita eksekutorial dalam perkara perdata. Dengan sumber data-data diatas diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data-data yang diperlukan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara mempelajari objek yang akan diteliti secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan.

1) Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang penulis ajukan, maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan skripsi ini penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Adapun alasan penulis memilih Pengadilan Negeri Surakarta, yaitu karena dekat dengan domisili penulis selain itu mengenai perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dalam perkara perdata pernah terjadi dan diperiksa.

2) Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subyek adalah hakim dan juru sita yang pernah memeriksa serta memutus kasus perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta serta melaksanakan sita eksekusi.

4. Metode pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang digunakan diatas, maka penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

a. Study kepustakaan

Yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang

dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini.

b. Study lapangan

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisa berbagai data sekunder dan data primer yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti.

c. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan pengecekan berkas-berkas perkara yang ada hubungannya dengan penulisan yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta.

d. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara.⁸

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan hakim dan juru sita Pengadilan Negeri Surakarta yang memutus perkara

⁸ Abdurrahman Fathonu, 2006. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 105

ini dan melakukan sita eksekusi. Dengan demikian penulis lebih mudah dalam menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut.

5. Analisis data

Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterangkan oleh data.⁹

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis yang sesuai dengan penelitian diskriptif adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif yakni analisis data yang meliputi yurisprudensi, peraturan perundang-undangan, literatur, ketentuan yang ada hubungannya dengan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita eksekutorial dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta dipadukan dengan pendapat responden di lapangan, dianalisis secara kualitatif dan dicari pemecahannya, disimpulkan kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

⁹ Lexy J. Mooeng, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, Hal. 205

F. Sistematika Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh isi dan jelas dari penulisan skripsi ini serta memudahkan pembaca untuk mengetahui isi yang terkandung dalam skripsi ini, adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Sita Eksekutorial
 - 1. Pengertian Sita Eksekutorial
 - 2. Macam-Macam Sita Eksekutorial
 - 3. Objek Sita Eksekutorial
 - 4. Tata Cara Sita Eksekutorial
- B. Tinjauan Tentang Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*)
 - 1. Pengertian Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*)

2. Macam-macam Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*)
3. Objek Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*)
4. Prosedur Pengajuan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*)
5. Tata Cara Pemeriksaan Sidang Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*)
6. Hubungan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) dengan Sita Eksekutorial

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Alasan pelawan mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita eksekutorial dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta.
2. Pertimbangan hakim dalam menentukan putusan perlawanan terhadap sita eksekutorial yang diajukan oleh pihak ketiga.
3. Pelaksanaan sita eksekutorial terhadap objek milik pihak ketiga yang diputuskan oleh hakim.

B. Hasil Pembahasan

1. Alasan pelawan mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita eksekutorial

dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Pertimbangan hakim dalam menentukan putusan perlawanan terhadap sita eksekutorial yang diajukan oleh pihak ketiga.
3. Pelaksanaan sita eksekutorial terhadap objek milik pihak ketiga yang diputuskan oleh hakim.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

LAMPIRAN